

RELASI PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT: KAJIAN PADA RUANG PERKOTAAN SEMARANG AWAL ABAD KE-20

Putri Agus Wijayati

Program Doktor Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada;
Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

ABSTRACT

This paper aimed at explaining various problems faced by the government of Semarang city in the contexts of market and society. This study would be presented as a contribution to the city government to be considered in making some policies related to market revitalization. The specific targets to be achieved were, firstly, describing the infrastructure of Semarang as a city area in the early 20th century, and, secondly, analyzing the socio-economic dynamics of the city dwellers in terms of Semarang development as a city area in the contexts of market and state. To achieve the targets, four method principles were used; they were collecting the data relevant to the focus of analysis, verifying the data, interpreting the data including data analysis and fact synthesizing. Finally, as a form of accountability, historiography was conducted. This study was essential to show that historical study which involves generalization and social significance are valuable to solve various problems of the city in recent eras.

Keywords: infrastructure, city, market, state, social significance

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah kota Semarang dalam konteks pasar dan masyarakat. Hasil penelitian ini akan dapat dipergunakan untuk memberikan kontribusi, yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kota dalam mengambil sebuah kebijakan terkait dengan revitalisasi pasar. Adapun target khusus yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan infrastruktur Semarang sebagai sebuah wilayah perkotaan pada periode awal abad ke-20. Menganalisis dinamika sosial ekonomi warga kota terkait perkembangan Semarang sebagai wilayah perkotaan dalam konteks pasar dan negara. Untuk mencapai tujuan itu, empat prinsip metode yang digunakan meliputi mengumpulkan data yang relevan dengan fokus kajian, verifikasi data, interpretasi atau menafsirkan yang di dalamnya termasuk analisis data dan sintesis fakta, dan sebagai wujud akuntabilitas penelitian akan dilakukan historiografi. Penelitian ini memiliki arti penting yang akan mampu menunjukkan bahwa kajian historis yang mengandung generalisasi dan social significance mempunyai nilai guna untuk mengurai berbagai problem perkotaan pada dewasa ini.

Kata-kunci: infrastruktur, perkotaan, pasar, negara, social significance.

PENDAHULUAN

Kajian ini terinspirasi oleh fenomena aktual yang dewasa ini mengemuka, yaitu pembangunan Pasar Bulu Semarang yang telah diresmikan menteri perdagangan di penghujung tahun 2014 masih menyisakan persoalan. Di antaranya, lantai dua dan tiga masih banyak yang kosong karena sebagian besar pedagang memilih berjualan di basement pasar (*sindonews.com*, 2014). Sementara itu, seperti disampaikan Walikota Semarang, kekumuhan pasar dan banyaknya pedagang beraktivitas di jalan, telah menjadi alasan perlunya dilakukan renovasi. Dikatakan pula bahwa secara fisik, konsep pembangunan Pasar Bulu tidak kalah dengan pasar modern (*semarang.solopos.com*, 2014). Dalam batas tertentu, tujuan pemerintah kota untuk mengakomodasi pedagang ke dalam Pasar Bulu, belum seluruhnya berhasil. Lahir argumentasi yang sama dari Kepala Dinas Pasar, yaitu Pasar Peterongan perlu direvitalisasi karena sudah tidak mampu menampung pedagang, sehingga menyebabkan banyak pedagang berjualan di pinggir jalan atau trotoar.

Fenomena aktual itu merupakan pandangan-pandangan kekinian sebagai latar belakang memilih topik. Adapun latar belakang persoalan dalam penelitian ini bisa dilihat sejak tiga dekade sebelum Semarang berstatus kotapraja. Semarang telah mengalami peningkatan kegiatan perdagangan yang pesat. Perkembangan perdagangan itu ditandai sejak liberalisasi ekonomi tahun 1870, terutama perdagangan gula, sehingga mampu melahirkan raja gula, Oei Tiong Ham (Ling, 1991: 219-239; Tio, t.th.: 29). Diperkuat lagi, melalui kebijakan desentralisasi telah meneguhkan Semarang sebagai salah satu kota terdepan bersama Jakarta dan Surabaya (Coban, 1988: 266). Status kotapraja yang disandang Semarang, menurut Milone membawa konsekuensi-konsekuensi (1986: 19-26; Ketjen, 1915: 356). Dewan kota sebagai pihak yang menyelenggarakan wewenang negara, membawa standar Barat ke kota ini. Di antaranya

pemerintah kota *concern* terhadap: 1) ingin membuat kota kelihatan teratur dan tertib; 2) didorong oleh kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, orientasi pemerintah kota mengarah pada kehidupan kota agar lebih sehat, karena yang tinggal di kota tidak hanya orang Pribumi, namun juga orang Eropa yang juga berkepentingan terhadap berbagai masalah yang disebabkan oleh kekumuhan pasar. Jadi, kalau kota bisa diatur sedemikian bersih, maka akan mempengaruhi kualitas dan totalitas hidup di perkotaan. Dalam konteks di sini, karena pasar merupakan bagian dari fisik kota, maka infrastruktur kota tidak berdiri sendiri, namun memiliki hubungan dengan infrastruktur lainnya.

Berdasarkan latar belakang topik dan latar belakang permasalahan di atas, maka kajian ini menjadi penting untuk menjawab dan memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan terhadap persoalan kekinian yang masih sangat krusial dihadapi kota-kota di Indonesia, khususnya kota Semarang.

Permasalahan yang dikaji adalah sebagai berikut. (1) Pertumbuhan infrastruktur kota seperti apa yang menjadi pertimbangan pemerintah kota untuk memodernisasi pasar; (2) Dinamika sosial ekonomi penduduk seperti apa yang berlangsung di Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian terhadap fenomena kelampauan, sehingga menjadi relevan untuk dapat menghasilkan historiografi, akan digunakan metode penelitian sejarah. Suatu metode penelitian yang mengacu pada proses menguji dan menganalisis secara kritis berbagai data sejarah melalui beberapa tahapan (Garraghan, S.J., 1957; Gottschalk, 1975; Kartodirdjo, 1993; Abdurrahman, 1999; Sjamsuddin, 2007). Perlu disampaikan bahwa, dalam penelitian sejarah, lokasi penelitian tidak selalu harus dilakukan pada lokus kajian. Hal ini karena, peneliti

sejarah sering berhubungan dengan sumber atau data yang tersimpan pada lembaga pengelola informasi kesejarahan.

Kajian ini mengambil cakupan temporal tahun 1900-an berimplikasi pada jenis dan metode pengumpulan data yang akan digunakan. Sumber tekstual pada penelitian ini antara lain: *Staatsblad van Nederlandsch Indië* (Lembaran Negara Hindia Belanda), surat kabar sezaman (*De Locomotief*, Selomporet Melajoe, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië*), *Gemeente-Blad Uitgegeven voor Rekening der Gemeente Semarang*. Adapun sumber non-tekstual (*artifact*) atau dalam bahasa arsip disebut arsip visual (Lohanda, 2011), di antaranya berupa foto dan peta (kartografik) mengenai Semarang.

Interpretasi atau penafsiran atas data menjadi cara untuk memahami sumber. Dalam kerangka inilah, penafsiran atas data dibedakan dua macam, analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 1995:101). Setelah data tentang infrastruktur kota, demografi, aspek-aspek ekonomi warga kota, termasuk kondisi pasar di Semarang telah dikumpulkan, maka dilakukan analisis untuk bisa menemukan fakta sejarah. Pada dasarnya dari sumber/data terkait fokus kajian yang sudah ditentukan mengandung beberapa kemungkinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Infrastruktur Sebagai Kawasan Perkotaan

Memasuki dekade pertama awal abad ke-20, Semarang telah berkembang menjadi kota perdagangan yang modern. Kemodernan kota, secara fisik terlihat dari beberapa kelengkapan infrastruktur, seperti kantor perusahaan dagang, agen perkebunan, gedung perbankan, gudang milik pemerintah dan swasta dengan jumlah yang semakin bertambah banyak, terutama sejak tahun 1870. Beberapa bangunan itu, memperlihatkan Semarang berkembang sebagai kota tempat bertemunya para pebisnis. Pertumbuhan kota yang sedemikian rupa, secara ekonomi tidak terlepas dari perkembangan perdagangan

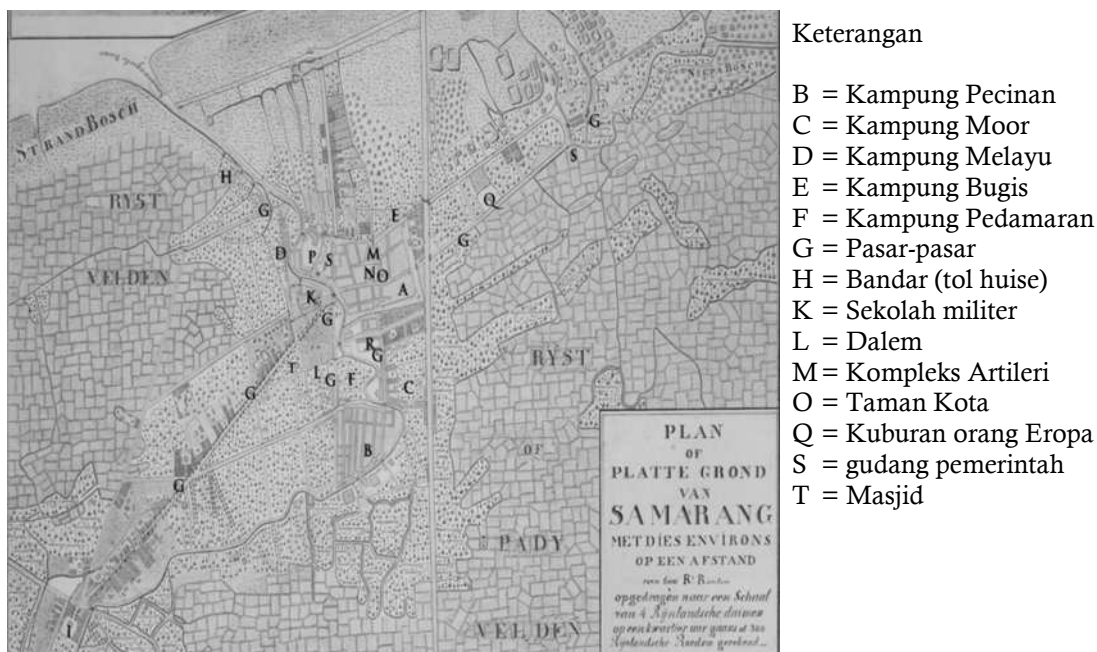
yang berlangsung. Perkembangan perdagangan, didukung oleh keberadaan pelabuhan dan Sungai Semarang.

Semarang tumbuh dan berkembang sebagai kota mengalami proses dan perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi menjadi penanda dari setiap kebijakan dan kemajuan yang dialaminya. Posisi Semarang yang berada di pantai utara Jawa, turut mendasari perkembangan ekonominya menjadi lebih bersifat sebagai kota pelabuhan, kota dagang, dan sebagai pusat administrasi pemerintah kolonial Jawa bagian tengah. Untuk melihat perubahan yang berlangsung atas perkembangan kota hingga awal abad ke-20, akan digunakan peta tahun 1800 (Gambar 1) dan peta tahun 1909 (Gambar 2).

Berdasarkan peta tahun 1800 (Gambar 1) terlihat bahwa kawasan yang kemudian menjadi Kota Semarang masih didominasi ladang padi dan tegalan. Satu abad kemudian, seperti ditunjukkan dalam peta tahun 1909 (Gambar 2), perubahan yang dialami Semarang begitu tampak, baik dari sisi infrastruktur maupun pertambahan penduduk, yang ditandai dengan munculnya pemukiman di segala penjuru kota.

Pemukiman penduduk kota cenderung untuk bertempat tinggal mengelompok di suatu kawasan yang kemudian dinamakan kampong (Wijanarka, 2007: 27). Pengelompokan ini didasarkan atas beberapa kategori, yaitu *pertama* etnis dan *kedua* komoditas barang yang diperdagangkan. Di luar dua kategori itu, terdapat kampong yang penduduknya terdiri atas beberapa etnis. Keberadaan Kampung Melayu (Budiman, *Suara Merdeka*, 2 April 1976). sebagai contoh, pada awal abad ke-19, tidak hanya dihuni oleh pedagang dari Semenanjung Melayu melainkan juga oleh pedagang Arab, Sumatra, dan Kalimantan (Reid, 2001: 306-310). Heterogenitas etnis dalam suatu pemukiman terdapat pula pada Kampung Pedamaran (Joe, 1933: 60). Pedagang pribumi dari berbagai daerah mendominasi penghuni kampung itu.

Pengelompokan masyarakat atas



Gambar 1: Peta Semarang Tahun 1800 (Sumber: Gahetna.nl)

kategori etnis yang tegas, dalam peta tahun 1800 bisa dilihat melalui keberadaan Kampung Pecinan, Kampung Bugis, dan Kampung Moor. Kampung Pecinan merujuk pada sebuah kawasan yang merupakan pemukiman masyarakat Tionghoa, yang lokasinya di sebelah selatan Kampung Pedamaran. Menurut Anthony Reid, komunitas pedagang Tionghoa semakin meningkat pada akhir abad ke-18 dan selalu lebih banyak di Batavia dan Semarang (Reid, 2001: 301). Hal yang serupa, menurutnya, terjadi pula pada komunitas pedagang dari Sulawesi Selatan. Gambaran itu dapat dilihat dalam peta yang sama melalui keberadaan Kampung Bugis (Ammarell, 2002: 54), yang lokasinya di sebelah utara pusat pemerintahan Eropa.

Berseberangan dengan Kampung Pedamaran, di sisi timur sungai terdapat Kampung Moor. Kampung yang pada awal abad ke-19, masih ditempati oleh orang-orang Moor (O'Brien, 1937: 467), pada masa kemudian menjadi pemukiman orang Koja, yang oleh masyarakat Semarang lebih dikenal sebagai Kampung Pekojan Selatan (Joe, 1933: 54; Gillion, 1966: 124-125; Suud, dalam Muhammad, 1995: 237 – 244; Blackburn, 2011: 44). Selain itu, terdapat satu kelompok

masyarakat yaitu orang Arab yang sejak awal tidak memiliki pemukiman tersendiri, melainkan tinggal di kawasan pemukiman orang Koja dan sebagian tinggal di Kampung Melayu (Shokeh, 2014: 68). Kondisi ini bisa dijelaskan melalui tulisan Raffles yang menyatakan bahwa setelah ditetapkan monopoli Belanda dan dihapuskannya perdagangan dengan India, jumlah orang Moor berkurang, bahkan mereka tidak pernah lagi mengunjungi Jawa. Menurut van der Kroef, pada abad ke-19 pedagang dari Arab yang datang berkelompok ke Jawa semakin banyak (Kroef, 1953: 302 & 305), dan realitas itulah yang mengubah Pekojan akhirnya benar-benar menjadi pemukiman Arab (de Jonge dalam Grijns & Nas (peny.), 2007: 152), yang beberapa puluh tahun kemudian menjelma sebagai pemukiman dan perdagangan Tionghoa.

Masih dalam peta tahun 1800, terdapat hal yang menarik, yaitu tidak terekamnya pemukiman orang-orang Jawa yang sebenarnya mendominasi penduduk kota. Melalui bukti lain ditunjukkan, orang Jawa tersebar di berbagai sudut kota mendiami beberapa kampung. Beberapa di antaranya pada sisi timur sungai, atau lebih tepatnya di sebelah selatan Kampung Moor terdapat

Kampung Petudungan, Ambengan, Gandekan, Gabahan, dan Deresan. Di belakang Jalan Bojong terdapat Kampung Poncol, Karangtengah, Sekayu, dan Logenderan. Di sebelah timur pemukiman Eropa, terdapat Kampung Karangbidara, Kobong, dan Terboyo.

Di samping kampung, elemen lain yang juga perlu dihadirkan tentang Kota Semarang adalah pemerintahan. Dalam konteks ini, terdapat dua kawasan yang menjadi pusat kekuasaan, yaitu pemerintahan Pribumi dan Eropa. Di sebelah barat Kampung Pedamaran dijumpai tempat tinggal bupati yang terpisahkan oleh pasar (Tio, t. th.: 38; Muhammad, 1995: 8). Sementara di sisi timur sungai, dijumpai kawasan pemukiman dan pusat pemerintahan Eropa beserta infrastruktur yang pada peta tahun 1800 masih dikelilingi oleh tembok benteng. Tembok benteng ini merupakan rekonstruksi untuk kedua kalinya dan sebagai perluasan dari bangunan benteng yang sebelumnya digunakan Kompeni ketika awal kepindahan dari Jepara. Tembok benteng hasil rekonstruksi kedua itu kemudian dibongkar pada tahun 1824. Kelengkapan fisik kota untuk mendukung kekuasaan Belanda cenderung pada infrastruktur militer, yaitu berupa kompleks artileri yang sekarang digunakan sebagai asrama Corps Polisi Militer (CPM). Pada sisi timur sungai terdapat sekolah militer (lokasi ini sekarang digunakan untuk gedung kas negara). Dari sekolah militer inilah, di kemudian hari memunculkan istilah *kadet* untuk menyebut preman pasar di Semarang.

Dari sisi kelengkapan fisik, seperti dalam peta tahun 1800, Kota Semarang memiliki delapan pasar sebagai infrastruktur ekonomi. Empat pasar lokasinya dekat sungai, yaitu Pasar Pedamaran, Pasar Regang, Pasar Jurnatan, dan Pasar Kampung Melayu. Empat pasar yang lain, kehadirannya terkait pembangunan jalan raya pos Daendels yang telah membawa pola perubahan kota. Sebuah pola perkembangan baru atas keberadaan pasar terbentuk, di antara keberlangsungan pola

lama. Perkembangan baru itu tidak hanya bersifat vertikal, melainkan juga berkembang secara horisontal (Nas dan Pratiwo, 2007: 267 – 268). Hal itu dapat dibuktikan dari keberadaan dua pasar di sisi barat kota sepanjang jalan Bojong, yaitu Pasar Karangtengah dan Pasar Gendingan. Dua pasar di sisi timur kota mengikuti jalan ke arah Demak, yaitu Pasar Karangbidara dan Pasar Terboyo. Artinya, dari sisi persebaran ruang ternyata cukup lengkap. Dari sisi persebaran lokasi, pasar di bagian timur dan barat kota juga ada, jadi di berbagai sudut kota cukup terwakili. Persebaran lokasi pasar membuktikan, bahwa pola pertumbuhan pasar mengikuti perkembangan pemukiman yang berupa kampung dan jalan.

Seratus tahun kemudian, perubahan yang terjadi begitu besar, seperti terlihat pada peta tahun 1909. Beberapa perubahan yang terjadi, *pertama* jalur kereta api antara Semarang – Solo yang pembangunannya dimulai tahun 1864 - 1870, dan dua tahun kemudian, tahun 1872 dilanjutkan dari Solo – Jogja (Suryo, 1989: 108). Adanya jalan kereta api, telah mempercepat transportasi antar daerah dan memudahkan pedagang, karena pengangkutan barang ke dan dari Semarang – pedalaman menjadi semakin cepat, ongkos lebih ringan serta tidak banyak terjadi kerusakan. Perhubungan dagang Vorstenlanden – Semarang semakin besar dan berkembang pesat.

Demikian pula pembangunan tram, semakin memperluas jaringan lalu lintas berbagai kawasan di kota Semarang. Jalur tram membuka hubungan kota dengan pinggiran kota, tanpa harus selalu bergantung pada sungai lagi. Sebuah stasiun tram kota dibangun di Jurnatan sebagai pusat jaringan tram kota, lokasinya di sisi timur sungai. Jalur tram ini merupakan transportasi kota yang membentuk jaringan antara kawasan Jomblang di selatan dengan kawasan Bulu di bagian barat. Di samping itu, juga melintasi jalan sepanjang jalur utara – selatan antara Jurnatan – Jomblang dengan melintasi Karangturi sejajar dengan jalan lama yang masih berfungsi sampai saat ini, yaitu Jl. Mataram,



Gambar 2. Peta Semarang Tahun 1909
(Sumber: kitlv.nl)

yang dipisahkan oleh perkampungan pribumi, serta menghubungkan kawasan Jurnatan dengan Bulu yang melintasi Jl. Bojong. Perkembangan transportasi yang terjadi, tidak sebatas menjadikan Semarang sebagai kota dagang modern, namun juga telah menjadi magnet bagi penduduk dari luar Semarang (White, 1991: 64). Fenomena itu memperkuat kajian White tentang migrasi desa kota yang pada dasarnya merupakan reaksi terhadap tidak adanya peluang pendapatan di luar pertanian dalam perekonomian desa, sehingga mereka harus mencarinya dalam kehidupan ekonomi kota. Oleh karena itu, menjadi semakin banyak penduduk yang memasuki kota. Realitas yang kemudian mengemuka adalah fenomena pemukiman menjadi semakin padat dan berhimpit (Cobban, 1974: 403-427).

Perubahan *kedua*, pada dua kawasan, yaitu sekitar Pasar Kampung Melayu dan Pasar Pedamaran memperlihatkan pertumbuhan pemukiman semakin beragam. Perkembangan pemukiman pedagang di sekitar Pasar Pedamaran, ditandai dengan munculnya nama-nama pemukiman baru, seperti Sedogan, Purmasan, Ngabangan, dan Sumenepan. Lahirnya kampung ini bisa dikaitkan dengan migrasi yang dilakukan kelompok masyarakat muslim yang berasal dari Madura. Di antara migran Madura, yang masuk ke Kota Semarang dan bermukim

dekat Pasar Semarang dengan nama Sumenepan, diduga kuat bekerja sebagai kuli atau menjadi pedagang kecil. Menurut Bambang Purwanto, migran Madura ini memiliki andil besar dalam terciptanya usaha ekonomis baru, sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan masyarakat di daerah perkotaan (2000: 61).

Sementara itu di dekat Pasar Kampung Melayu, dapat dijumpai beberapa komunitas baru yang bermukim di dalam masing-masing kampung yang bernama Kampung Banjar. Untuk mengetahui keberadaan kampung ini, akan meminjam penjelasan Bambang Purwanto, yang menyatakan bahwa intervensi militer Belanda abad ke-19 di berbagai wilayah Nusantara berpengaruh terhadap pola migrasi penduduk. Para pedagang tekstil dan keris dari Banjar menguasai pasar di wilayah tertentu (2000: 57). Orang Banjar yang datang ke Jawa tidak lagi bekerja di perkebunan, seperti yang ditunjukkan dalam catatan Bambang Purwanto tentang tenaga kerja di perkebunan karet Palembang (Purwanto dalam Lindblad (ed.), 2002: 213). Pola inovatif migrasi orang Banjar ke Jawa Tengah bekerja sebagai pedagang (Basri, *Prisma*, 1988: 43). Sementara menurut Potter, orang Banjar yang semuanya beragama Islam, kadangkala digolongkan sebagai "Melayu" (Potter dalam Lindblad (ed.), 2000: 372). Sebagai sebuah kebetulan atau analisis Potter bisa diterima, yang pasti keberadaan Kampung Banjar berdekatan dengan Kampung Melayu. Kampung Cerbonan, Kampung Bandengan, dan Kampung Pranakan. Sebuah kawasan baru yang kemudian berkembang menjadi pemukiman kampung pribumi terletak di sebelah selatan kota adalah Peterongan, sekalipun masih dipenuhi sawah dan tegalan, namun penduduk pribumi sudah banyak yang mendirikan rumah dan membuka warung, seperti nampak dalam Gambar 3.

Di luar kategori itu, dijumpai pula tempat hunian lebih kecil dari orang-orang Jawa, mereka tinggal di dalam ru-

mah komunal yang disebut *pondok*. Penghuni *pondok* biasanya pedagang kecil yang datang ke kota hanya untuk bekerja. Mereka datang dari daerah asal yang sama, mempunyai rumah permanen di desa, di mana istri dan anak-anaknya tetap tinggal di desa (Hugo, 1982: 61; Wertheim, 1956: 163). Sementara kajian Irwan Abdullah yang menangkap adanya fenomena *pondok* sebagai rumah kontrakan yang didirikan di kota untuk orang-orang Bawean dan berfungsi untuk mengakomodasi pendatang baru dalam menjalankan usaha (1994: 33). Beberapa di antaranya, seperti nampak dalam peta tahun 1909 dapat ditemukan nama Pondok Pati, Pondok Gresik, dan Pondok Tuban. Dalam peta yang sama, realitas kota yang tampak, menunjukkan bahwa Semarang telah tumbuh sebagai sebuah kota. Realitas itu diperkuat oleh laporan berita yang dimuat dalam *Selompret Melajoe* berikut ini.

Iboe negeri Semarang pada masa ini makin bertambah sadja eloknja, sedang roemah-2nja dibaharoei, malahan agaknja tiada ada berhentinja orang membangoenkan roemah-2 gedong, seperti: di pinggir Hooenraaslaan di djalan ke Tjandi, dalam kota dan lain-2 tempat. Slokan-2 poen kebanyakan soedah diberi tamping batoe, dan deras alir airnja, hingga menambahi kenjamanan badan dan kesenangan jang melihatnja (Selompret Melajoe, 21 Djanoeari 1908).

Namun kenyataan itu tidak didukung oleh kebersihan jalan yang seharusnya hadir di sana. Di beberapa bagian kota ditemukan tempat-tempat yang tidak sehat, seperti yang ditunjukkan oleh Hendrik Freerk Tillema. Dalam artikelnya yang berjudul "Jalan Daendels", ia menyampaikan bahwa jalan yang merupakan kebanggaan Belanda di koloni ini telah menjadi "sebuah jamban besar" (Mrázek, 2006: 35 – 36).

Demografi dan Dinamika Sosial Kota

Pada penghujung abad ke-19, Semarang sudah berkembang sebagai kota

pelabuhan terkemuka di pantai utara Jawa bagian tengah. Perkembangan yang dicapai kota ini merupakan hasil dari proses yang berlangsung selama lebih kurang dua abad sebelumnya. Posisi Semarang sebagai kota pelabuhan dengan basis ekonomi perdagangan, telah menjadi magnet berbagai kelompok etnis dan suku bangsa untuk memasuki kota ini.

Dalam perkembangan selanjutnya, mereka kemudian menjadi salah satu elemen kota yang turut mewarnai kemajuan maupun kemunduran Semarang. Kehadiran mereka merupakan bagian dari proses pengotaan yang menghuni kampung-kampung secara berkelompok berdasar latar belakang etnis. Berbagai komunitas etnis dan pengelompokan permukiman di dalam lokalitas yang terdefiniskan secara tegas, menurut Bambang Purwanto, hanya saling berhubungan secara longgar melalui perdagangan (2009; Furnivall, 2009: 474). Artinya, kepentingan ekonomi mampu mencairkan struktur masyarakat yang terbangun, dan pasar di kota merupakan ruang yang menjadi tempat berbaurnya penduduk yang terpisah secara sosial.

Menurut Frederick (1983), penduduk kota lebih dilihat sebagai keragaman etnis. Keberagaman itu terklasifikasi secara hirarkis atas dasar hukum kolonial menjadi tiga tingkatan, yang menempatkan kelompok orang Eropa pada lapisan teratas. Orang Tionghoa dan Timur Asing lainnya (Kroef, 1953: 301). merupakan kelompok yang berada pada lapisan menengah dan orang pribumi (Indonesia) diposisikan pada strata bawah. Berbagai kelompok etnis dan suku bangsa itu hidup dalam struktur masyarakat kolonial yang segregatif.

Mereka tersegregasi di dalam kegiatan sosial yang ditandai dengan munculnya kekhasan yang menjadi nama kampung-kampung tertentu, dan pada gilirannya akan menjadi penanda nama-nama pasar. Terbentuknya kampung-kampung sebagai tempat pemukiman berbagai etnis dan suku bangsa, sebenarnya bukan sesuatu yang baru ketika Belanda secara formal memiliki bentuk



Gambar 3. Warung pribumi di Kota Semarang tahun 1900 (Sumber: gahetna.nl)

pemerintahan. Menurut Resink, permukiman orang asing yang memiliki pemimpin dari komunitas masing-masing telah ada di Jawa sejak abad ke-11. Lebih lanjut Resink menyatakan, bahwa tradisi itu diteruskan dalam koloni Hindia Belanda, sebagai contoh, salah satunya diper tegas melalui pemukiman orang Tionghoa di bawah kontrol pimpinan kapiten, sementara pemukiman orang Arab, Bengali (India), Bugis, dan Moor di bawah pimpinan “kepala kampung” masing-masing. Opsir polisi di Paterongan, J.L. Van Gelder (19 Mei 1880); Opsir di Boeloe, A.M.F. Fisscher (5 Maret 1881); Mayor-tituler Tionghoa, Lim Yan Bing (24 September 1883); Kapiten-tituler Tionghoa, Tan Ing Bie (16 Januari 1884); Luitenan Tionghoa, Tjoa Sien Tjing (24 September 1883); Kepala kampung Arab dan orang Bengali dipegang oleh kapiten Arab, Said Achmad bin Salim Moetahar (2 Januari 1882); Kapiten Moor, Mohammad Elia Djenal Aziekein (5 Juni 1878); Kapiten Bugis, Daeng Abdoel Rachman (12 Agustus 1884) (*Regeringsalmanak voor Nederlandch-Indië 1885*, 1884:155; Resink, 2012: 194).

Sekalipun keberagaman etnis hadir di Kota Semarang, tetapi penduduk pribumi terlihat dominan. Hal ini ditunjukkan dalam populasi penduduk di Kota Semarang pada pertengahan abad ke-19. Dari jumlah keseluruhan penduduk kota sebesar 29.000 jiwa, 20.000 orang di antaranya merupakan penduduk pribumi. Empat puluh tahun kemudian, pada 1890 penduduk pribumi menjadi 53.974 jiwa

dari jumlah penduduk kota 71.186 jiwa, artinya terdapat penambahan populasi penduduk pribumi 33.974 jiwa (41,13 %), atau secara keseluruhan terjadi peningkatan sekitar 59,26 % dalam 40 tahun. Dari jumlah 71.186 orang, terdiri atas orang Eropa 3.565 jiwa, orang Tionghoa 12.104 jiwa dan orang Timur Asing lain 1.543 jiwa (Brommer, et al., (ed.), 1995: 23).

Satu dekade kemudian, tahun 1900 penduduk kota secara keseluruhan menjadi 89.286 orang yang terdiri atas pribumi 70.426 orang, Eropa 4.800 orang, Tionghoa 12.372 orang, dan Timur Asing lain 1.688 orang (*Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië 1902*: 9). Populasi penduduk kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan 20 tahun kemudian, tahun 1920 jumlahnya sudah berada pada angka 158.036 jiwa (Penduduk Pribumi 126.628 jiwa, orang Eropa 10.151 jiwa, orang Tionghoa 19.720 jiwa dan orang Timur Asing lain 1.530 jiwa (Brommer, 1995: 23), berarti mengalami penambahan sebesar 68.750 jiwa. Angka itu menunjukkan sejak dua puluh tahun pertama awal abad ke-20 berlangsung pertumbuhan penduduk secara pesat. Padahal pada abad sebelumnya, yaitu selama pertengahan kedua abad ke-19, angka itu baru dapat terpenuhi dalam rentang waktu 50 tahun.

Uraian di atas memperlihatkan adanya keberagaman etnis warga kota. Keberagaman itu berimplikasi pada keanekaragaman jenis pekerjaan yang ditekuni. Orang Eropa banyak yang berprofesi sebagai pegawai pada instansi pemerintahan, manajer dan menjadi staf pada agen perkebunan maupun agen perdagangan swasta, pedagang terutama dalam skala besar (grosir), dan dinas kemiliteran. Tidak semua orang Eropa berprofesi sebagai pedagang besar. Di antara mereka, ada juga yang berprofesi sebagai pembuat gerobak, menempa besi, membuat pelana, tukang jam, penjahit, berjualan buku dan kertas, fotografi, pembuat topi wanita, dan pengurus rumah penginapan (Suryo, 1989: 175). Kenyataan di atas menunjukkan bahwa

tidak semua orang Eropa yang tinggal di Kota Semarang termasuk dalam kategori orang yang “berada” (*Selomporet Melajoe*, 8 Agust 1908).

Sementara, di kalangan penduduk pribumi menekuni pekerjaan bidang pertanian, perikanan, perdagangan dalam skala kecil atau yang disebut pedagang eceran. Istilah pribumi dalam penelitian ini mengacu pada *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* yang membuat kategorisasi pribumi terdiri atas berbagai etnis di Indonesia masa kolonial. Dalam konteks Kota Semarang etnis Jawa, Melayu, Bugis, Madura, Banjar, dan Sunda. Pedagang eceran ini menangani kebutuhan hidup sehari-hari, di antaranya berjualan beras, palawija, ikan, minyak kelapa, sayur, buah, garam, gula aren, dan tembakau. Pekerjaan dalam bidang kerajinan dengan skala industri kecil rumah tangga juga dilakukan kelompok pribumi. Pusat kegiatan yang menekuni industri rumah tangga, terutama pakaian batik, misalnya, ditandai dengan adanya Kampung Batikan.

Realitas di atas menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Pada tahun 1907, ditemukan perempuan pribumi Jawa melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan ketika dilakukan pembangunan selokan di sepanjang Jalan Bojong. Di satu pihak, penggunaan tenaga kerja perempuan didasarkan pada pertimbangan ekonomis, yaitu upah yang diberikan lebih murah dibandingkan laki-laki. Pada pihak lain, dalam segi waktu, perempuan tidak banyak meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mencari korek api untuk menyalakan rokok, seperti yang banyak dilakukan laki-laki ketika bekerja (*Selomporet Melajoe*, 29 Nov 1907).

Sebagai sebuah realitas historis, hadirnya nama kampung di Kota Semarang banyak yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan penduduknya. Sebagai gambaran, selain yang telah disebutkan di atas, adalah lahirnya sebuah kampung kecil yang disebabkan banyaknya warung penginapan untuk bermalam pedagang dari Jepara, sebelum pagi harinya men-

dasarkan capping (*tudung*) di sepanjang jalan yang kemudian dinamakan Petudungan. Fakta lain, nampak dengan adanya pemukiman tempat pembuat gong dan tukang gending yang menurut konsepsi Jawa, kelompok ini mempunyai keahlian khusus (Jacobson, van Hasselt, and Andrew Toth, 1975: 129). Orang-orang Jawa memperoleh pengakuan internasional untuk jenis pekerjaan yang berhubungan dengan logam, seperti gong dan keris (Dick, dalam Lindblad (ed.), 2002: 179). Pemukiman itu kemudian dinamakan Kampung Gendingan, sebagai bukti keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Masih banyak lagi nama-nama kampung di Kota Semarang yang menunjukkan latar belakang pekerjaan penduduknya. Nama kampung seperti ditunjukkan dalam peta tahun 1909 antara lain: Kampung Pandean, Bandengan, Purmasan, Kulitan, Kapoeran, Paderesan, Petolongan, Kentangan.

Sementara itu, komunitas Tionghoa, Arab, dan Bengali sebagian besar menekuni bidang perdagangan dan jasa. Di antara ketiga komunitas ini, orang Tionghoa mempunyai posisi lebih utama jika dibandingkan dengan orang Arab dan Bengali maupun penduduk pribumi. Menurut Leirissa, kelompok Tionghoa menduduki tempat khusus karena posisinya tidak terikat oleh birokrasi kolonial, tetapi secara ekonomi memiliki peranan penting dan hubungan erat dengan pemerintah (Leirissa, 1985: 10; Nas dan Welmoet Boender, dalam Nas (ed.), 2007: 209). Peran kelompok ini, terutama orang Tionghoa kaya yang menjadi opsir mempunyai posisi strategis. Strategis secara sosial karena mendapatkan kehormatan besar, secara ekonomis juga sangat strategis dengan keuntungan finansial yang diperolehnya. Salah satu keuntungan finansial itu, berasal dari hak pemungutan pajak yang diborongkan ataupun dijual kepada orang Tionghoa kaya, yang telah berlangsung sejak masa Kompeni. Hak pemungutan pajak oleh Kompeni biasanya dijual kepada orang-orang Tionghoa yang sekaligus menjadi opsir, dengan pangkat mayor, kapiten,

sampai paling bawah yaitu *luitenant* (Williams, 1956: 375-376; Rush, 1983: 52-64). Model pemborongan pajak itu disebut sistem *pacht*. Sistem ini diberlakukan antara lain terhadap penjualan candu, garam, bunga (*rente*) rumah gadai, penyeberangan kali, dan pasar. Bagian itu merupakan pemasukan pemerintah yang cukup besar yang berasal dari pajak perbandaran kepada orang Tionghoa, dengan menjual lisensi untuk mengoperasikan pasar (Deventer, 1904: 98; Blackburn, 2011: 40).

Pemegang *pacht*, yang dinamakan *pachter* tidak sebatas memiliki keuntungan finansial, namun juga mempunyai kebebasan untuk tinggal di luar Kampung Pecinan. Sementara itu, bagi orang Tionghoa kebanyakan, yang tidak dalam konteks *pachter* hanya diizinkan tinggal di Pecinan dan mobilitas mereka dibatasi melalui sistem *passenstelsel*. Lim Thian Joe menyebutkan, bahwa sistem *pas* atau izin dibedakan ke dalam 4 macam: 1) *louw-dji* (surat izin ketika akan pergi dari satu tempat ke tempat lain; 2) *Pa-sat-dji* (izin untuk mereka yang pergi ke pasar di luar kota setiap hari pasaran), kebanyakan diperuntukkan bagi orang Tionghoa yang tinggal di tempat kecil, karena kegiatan dagang berjualan keliling desa. Dalam surat izin harus tertulis secara jelas, pergi ke pasar mana dan barang dagangan apa saja yang akan dijual. Selain tempat yang disebutkan dalam *pas* maka tidak diperkenankan dikunjungi. *Pas* dibuat di atas zegel f 1,50 dan setiap tahun diperbarui; 3) *Le-sa-dji* (izin pergi ke desa dalam melakukan pembelian tembakau, kopra, dan padi; 4) *Ni-dji*, yaitu izin tahunan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu kota ke kota lain, dan digunakan oleh saudagar yang sering pergi. *Passenstelsel* ini tahun 1906 dicabut oleh pemerintah, menyusul penghapusan *wijkenstelsel* tahun 1915 (Joe, 1933: 88, 90). Kebebasan yang dimiliki *pachter* sebagai agen pajak digunakan juga untuk berdagang, sehingga keluarga opsir dan *pachter* mendominasi perdagangan lokal.

Kedudukan sebagai opsir yang sekaligus sebagai pemegang *pacht* di Se-

marang “menyerupai” jabatan turun temurun. Bahkan untuk mempertahankan posisi itu, mereka menempuh jalan dengan menikahkan anak-anaknya. Menurut Onghokham (Onghokham, *Prisma*, 1983: 17), fenomena ini selama beberapa generasi berada di tangan satu keluarga sehingga keuntungan dan penumpukan modal dapat meningkat sangat cepat. Struktur masyarakat dan segregasi sosial yang telah terbentuk seperti diuraikan di atas, ternyata juga memicu hadirnya beberapa permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu ditunjukkan oleh sering munculnya laporan tentang perampasan, penipuan, pembegalan, dan pencopetan di dalam surat kabar lokal. Sebagai contoh, ditemukan dua orang keturunan Eropa (*Eurasia*) di kawasan Depok yang sering melakukan perampasan terhadap penjual susu untuk dipaksa dengan ancaman agar menyerahkan satu hingga dua botol. Sebelumnya, seorang budak dokter yang tinggal di Karangturi juga mengalami hal yang sama. Kawasan Depok merupakan kedudukan tuan Schout yang tentu saja ada penjagaan opas polisi, namun pelaku yang beraksi pada siang hari menunjukkan keberaniannya (*Selompret Melajoe*, 10 Okt 1906).

Beberapa kasus penipuan yang terjadi antara lain, barang tidak sampai di tempat tujuan. Dalam hal ini ada keluhan dari para pedagang yang mengirimkan barang dengan menggunakan gerobak seringkali mengeluh karena barangnya tidak sampai tujuan. Sekalipun ada upaya untuk mencegahnya, dengan cara si pengirim barang meminta karcis yang tertulis nama tukang dan nomer gerobak, tetapi tidak semua pedagang mengetahui cara ini (*Selompret Melajoe*, 26 November 1907; *Selompret Malajoe*, 8 Sept 1910). Bentuk penipuan yang lain dilakukan dengan berpemampilan rapi. Surat kabar lokal menceritakan bahwa pada hari Minggu pukul 08.00, seorang yang baru datang dari Demak turun dari tram. Dia hendak meneruskan perjalanannya, namun ketika sampai di sebelah timur Kali Semarang, dia bertemu dengan seseorang yang berpakaian rapi dan minta tolong

ditunjukkan letak Kampung Ilir. Dalam perjalanannya dia berjumpa dengan seorang yang mengaku kehilangan dompet, dan yang terjadi kemudian adalah dilakukannya penggeledahan terhadap kedua orang tersebut. Tanpa disadari, uang yang ada di dalam ikat pinggang orang Demak telah diambil oleh si penggeledah. Dia baru menyadari ketika membuka ikat pinggangnya, uangnya sudah tidak ada (*Selompret Melajoe*, 26 November 1907). Dalam hal ini, lebih lanjut *Selompret Melajoe* melaporkan bahwa penipuan itu dilakukan oleh *kadet*, seperti berikut ini

... Baroelah ia tahoe kena tipoe moeslihat kadet. Orang jang minta ditondjoekkan kampoeng Ilir itoe memang teman kadet, dan ia kadet djoega, maka poera-2 mendapat dompet, soepaja jang berpakai tjara hadji jaitoe temannja, boleh menggedah orang jang hendak dirampas oeangnja. Soenggoeh tjerdik kadet pada zaman kemadjoean ini.

Aktivitas yang dilakukan oleh *kadet* tidak sebatas penipuan, melainkan juga perampasan dan bentuk-bentuk kejahatan yang lain, dengan sasaran masyarakat, seperti diberitakan dalam harian lokal berikut (*Selompret Melajoe*, 7 Maart 1908)

... di lengkong Pedamaran itoe tempat perlindoengan kèrè-2 itoe benar, malahan marika itoe tidak mentingken minta-2 sadja, djoega dengen mengadet; orang membawa apa djoeapoen, asal sadja terdoekoeng, boleh dikata keilanganlah bila liwat di sitioe. Kemarin doeloe ada seorang prampoean soedah toea djoeal goela, liwat di sitioe, goela jang didoekoeng itoe hendak diambil, tapi ketaoeanlah hal itoe, prampoean toea marah sanget; kadet lantas ambil batoe, dilemparkannja kepala prampoean itoe, sahingga berloemoeran darah sambil menangis, kasianlah; kadet laloe melindoeng. Moedah-2an politie soeka mengiring dia terbawa di mana moestinja, ta mengapa merabab dia sedikit nanti ditjoetji baee jang melekat di tangan sebentar kan ilang, sebab di Semarang soedah dikata negeri jang

ternama, sajang kaloek misih ada kèrè menjerang berhampiran kota....

Masyarakat yang dijadikan objek sasaran *kadet*, tidak sebatas kelas bawah, tetapi juga kelas atas, seperti yang dialami Raden Widjojo Atmodjo ketika *kekoetila* arloji emas pada peristiwa peringatan (*thedakan*) Sampeyan Dalem Kanjeng Susuhunan di Stadion Semarang (*Selompret Melajoe*, 5 Maart 1908).

Selain persoalan ekonomi dan sosial, secara kultural kehidupan masyarakat kota tidak selalu mampu mengimbangi perubahan atas kemajuan kota yang berlangsung. Salah satu kemajuan itu ditandai oleh tumbuhnya kesadaran akan arti penting kebersihan dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam realitas keseharian, kaum perempuan pribumi dari kelas sosial bawah yang tinggal di kampung-kampung kota belum sepenuhnya mempunyai kesadaran itu. Kehadiran dokter yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat kampung, misalnya, tidak serta merta disambut dengan kesiapan mental, namun justru menimbulkan ketakutan, seperti yang digambarkan dalam berita berikut (*Selompret Melajoe*, Selasa, 26 November 1907).

Kemaren hari Minggoe, di kampoeng Pindrian teroes di Boeloe, orang2 perampoean sama ketjil hati, sebab mendengar kabar kalau maoe kedatangan toean docter, kira2 poekoel 1 ada anak ketjil taoe ada Belanda masoek di itoe kampoeng, tapi boekan docter, itoe anak taoe lantas lari, sama bertreak2 bilang ada docter, ada docter!. Wah gegernja orang2 perampoean sama lari, jang djoealan tinggal lintjknja, jang batik tinggal batikannja, jang baroe makan tinggal nasinja, ach! Kalau begitoe kasihan orang perampoean di dalam kampoeng lama2 djadi koeroes sakitnja dibikin sendiri. Tentang itoe tentoelah selamanja ta'akan berobah djika orang-2 itoe beloem terang betoel apa maksoednja diperiksa itoe....

Menjadi Gemeente

Bentuk pemerintahan kolonial secara legal

dimulai awal abad ke-19, ketika mengambilalih kekuasaan Kompeni. Diawali oleh Herman Willem Daendels (1808 – 1811) sebagai Gubernur Jendral ketika memperkenalkan kesatuan administrasi pemerintahan *prefektur* Day, 1905: 162-163); Suryo, 2009: 123), yang pada masa Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816) diganti dengan sistem karesidenan (Bastin, 1957). Di dalam sistem ini, Semarang sebagai kota, ditempatkan di bawah yurisdiksi asisten residen dan dikategorikan sebagai *afdeeling* (Malo & Nas dalam Nas, 2007: 500). Artinya, sejak awal abad ke-19, Semarang menjadi ibukota dua pusat pemerintahan, yaitu kabupaten dan karesidenan.

Pertengahan abad ke-19, sistem pemerintahan kolonial menunjukkan sifatnya yang sangat sentralistik di bawah pimpinan tunggal gubernur jendral di Batavia, dengan kerangka kekuasaan tidak langsung (Suryo, 1989: 7). Sistem ini direpresentasikan oleh pejabat Eropa mulai dari residen, asisten residen, dan kontrolir yang mempunyai yurisdiksi atas orang Eropa dan penduduk timur asing. Sementara yurisdiksi atas penduduk pribumi berada di bawah kontrol pejabat pribumi, antara lain bupati, patih, wedana, asisten wedana, lurah atau kepala kampung. Sistem sentralistik yang berimplikasi pada tidak adanya daerah otonom berlangsung sepanjang abad ke-19.

Suatu perubahan penting terjadi pada awal abad ke-20, yaitu sebuah pembaharuan administrasi pemerintahan di kota-kota Indonesia yang hadir bersamaan dengan lahirnya ideologi politik etis, menurut Bambang Purwanto, sering disejajarkan dengan pembangunisme. Berbeda dengan era tanam paksa yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi. Orientasi politik etis, yaitu memperkuat posisi negara di dalam mengelola sebuah koloni, sehingga salah satu ciri adalah intervensi atau keikutsertaan negara dalam beberapa hal, dengan alasan adalah negara berkepentingan agar programnya berhasil

(Puwanto, 2004: 130). Sebuah kebijakan desentralisasi atas dasar prinsip efisiensi dan otonomi diundangkan secara resmi tahun 1903, telah membawa perubahan atas kota-kota di Indonesia. Salah satu kota di Indonesia yang memperoleh bentuk pemerintahan *gemeente* sebagai implementasi dari undang-undang itu adalah Semarang, melalui *Staatsblad van Nederlandsch Indië (Stbl.)* 1906 No. 120.

Tiga hal yang menarik dari *Stbl.* 1906, yaitu *pertama*, bagian Karesidenan (*afdeeling*) Semarang yang menjadi ibukota Semarang disebut *gemeente* Semarang (Kuncoro, 1995: 6). *Gemeente* dilengkapi 19 komisi dewan kota untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan, yang salah satunya adalah komisi pasar. *Kedua*, mengenai perawatan, perbaikan, pembaharuan dan pembuatan pasar, yang secara finansial menjadi tanggung jawab *gemeente*. *Ketiga*, pada 1 April 1906 dibentuk dewan kota Semarang yang terdiri 23 anggota dengan komposisi 15 orang Eropa, 5 orang Pribumi, 3 orang Cina dan Timur Asing lainnya dengan Asisten Residen L.R. Priester sebagai ketua dewan. Lima belas keanggotaan golongan Eropa terdiri atas 8 orang dari pemerintahan dan 6 orang dari swasta. Demikian halnya keterwakilan golongan pribumi, terdiri atas 3 orang dari pemerintahan dan 2 orang perwakilan swasta. Satu anggota dari golongan Eropa, yaitu seorang insinyur dari *Burgelijke Openbare Werken* (BOW) sedang mengambil cuti pergi ke Belanda (*Selompret Melajoe*, Selasa, 30 Djanoeari 1906).

Keanggotaan dewan kota, sekalipun mewakili kelompok etnis yang tinggal di kota, menurut Basundoro, tidak mencerminkan representasi kuantitatif (Basundoro, 2012: 107). Terlepas dari tingkat keterwakilan yang tidak proporsional, pengikutsertaan golongan pribumi dalam pertimbangan keputusan atas berbagai problem perkotaan, setidaknya mulai dilibatkan. Problem perkotaan bermula dari pemerintah kota, orang-orang yang berkuasa terhadap kota, yaitu dewan kota. Dewan kota yang didominasi orang Eropa memperlihatkan bagaimana kota

diidealkan. Mereka membawa standard barat ke kota ini, di antaranya: 1) ingin membuat kota kelihatan teratur, tertib, dan indah; 2) membangun sebuah kesadaran di antara warga kota akan kebersihan dan kesehatan.

Ideologi pemerintah kota diorientasikan pada kehidupan di kota agar lebih sehat, karena yang tinggal di kota tidak hanya orang pribumi, namun juga orang-orang Eropa. Untuk itulah, pemerintah kota ingin menciptakan kondisi pasar-pasar di kota menjadi pasar yang tertib, teratur, bersih, dan sehat. Jadi, kalau pasar-pasar di Kota Semarang bisa diatur sedemikian tertib dan bisa dibuat sedemikian bersih, maka akan memengaruhi kualitas hidup dan totalitas hidup di perkotaan.

Pemikiran itu nampaknya terkait dengan bagaimana orang Eropa mempunyai kekhawatiran terhadap tidak sehatnya pasar. Orang Eropa mempunyai kepentingan terhadap menyebarnya penyakit yang disebabkan oleh kekumuhan dan ketidakbersihan pasar. Hendrik Freerk Tillema, salah satu anggota dewan kota, yang memiliki kepedulian atas tidak sehatnya kampung-kampung di Semarang (Nas dan Theuns, dalam Nas, 2007: 67-90). Kampung dan pasar yang tidak bersih telah menjadi salah satu pertimbangan dalam kebijakan pemerintah kota sejak dekade pertama abad ke-20. Oleh karena itu, kebersihan dan kesehatan masyarakat menjadi wacana publik yang berkembang kuat di Semarang setelah menjadi *gemeente*.

Ketua dewan kota, kontrolir polisi, dan sekretaris dewan telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi pasar. Pemeriksaan ini bertujuan untuk merencanakan pengadaan pegawai pasar, yang pekerjaannya semata-mata mengurus pasar dan mengawasi masuknya cukai pasar (*Selompret Melajoe*, 22 Djoeni 1907). Dalam sidang *gemeenteraad*, residen menyatakan bahwa jika pasar akan dimasukkan ke dalam kewenangan *gemeente*, maka harus dibuatkan peraturan pasar lebih dulu. *Gemeenteraad* mempertimbangkan bagaimana Pasar Jo-

har sebagai pasar terbesar menjadi produktif bagi kotapraja, tanpa menambah beban penduduk (*Selompret Melajoe*, 22 Joeni 1907; *De Locomotief*, 24 Joeli 1907). Dalam rapat juga dibahas pengurusan Pasar Johar, karena merupakan salah satu persoalan kota adalah bagaimana menebus *loods-loods* Pasar Johar dari tangan penjual (*Selompret Melajoe*, 29 November 1907).

Pada hari-hari pertama di Semarang diadakan rapat untuk membahas kemungkinan reorganisasi pasar di kota itu. Pada sidang tanggal 10 Desember 1907, dibahas anggaran tahun 1908 termasuk persoalan pasar yang belum disetujui oleh residen karena belum ada peraturan yang menentukan pengurusan pasar (*Selompret Melajoe*, 3 Desember 1907). Sementara dalam pemeriksaan residen, sebatas pembayaran *oeang sapon* kepada tukang sapu, belum ada kesepakatan akan dimasukkan ke dalam kas pemerintah kota, sehingga perlu diadakan peraturan baru, agar anggaran tentang pasar bisa diterima *gemeente*. Oleh karena itu, ketua dewan mengusulkan untuk membuat peraturan pasar atas dasar *Stbl.* 1906 №. 120 yang menyatakan bahwa semua ruang publik, seperti alun-alun dan pasar kota diserahkan pada wewenang *gemeente* Semarang. Pelimpahan wewenang itu berimplikasi pada pendanaan untuk membersihkan tempat-tempat tersebut haruslah berasal dari kas *gemeente*, dan yang menjalankan pekerjaan itu menjadi pegawai *gemeente* juga. Oleh karenanya, dewan kota memiliki kuasa untuk mengeluarkan keputusan, antara lain: 1) tukang *sapon* untuk pembersihan pasar-pasar yang menjadi milik *Gemeente* Semarang, akan diberi gaji dari kas *gemeente*; 2) *oeang sapon* akan dimasukkan dalam kas *gemeente*; 3) keputusan ini mulai berlaku pada 4 Januari 1908 (*Selompret Melajoe*, 12 Desember 1907).

De Locomotief mencatat tentang sebuah pasar yang baik menjadi penyebab kemajuan bagi banyak kota besar di Eropa. Perkembangan dan perbaikan lembaga pasar bagi kota menghasilkan keuntungan langsung dan tidak langsung yang sangat besar. Keuntungan bisa diharapkan, keti-

ka pasar diserahkan pengelolaannya kepada dewan kotapraja (*De Locomotief*, 27 Juli 1907). Dana ini bisa diserahkan kepada dewan kota untuk menutup pengeluaran yang diperlukan guna memperbaiki kondisi yang dialami penduduk pribumi. Saldo untung dari eksploitasi pasar, sebagian dialokasikan untuk membangun prasarana (jalan) antara pedalaman dan pasar di kota. Jalan tersebut di Semarang sangat buruk, karena lereng bukit Candi sangat curam. Jalan untuk kereta barang penduduk pribumi dapat dibiayai dari kelebihan tahunan hasil pasar.

Dalam laporan desentralisasi disampaikan, bahwa dewan kota sibuk mempersiapkan peraturan lembaga pasar yang baik. Peraturan ini terutama untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kondisi kesehatan pasar agar sesuai dengan tuntutan ide-ide kemodernan (Ketjen, 1915: 354-357). Selain itu, lembaga pasar yang teratur bagi kotapraja merupakan salah satu usaha kota terpenting (Hasselt, 1929: 955).

SIMPULAN

Dalam konteks kota dagang - kota pusat pemerintahan Jawa bagian tengah, serta kota tempat tinggal para pejabat dan pengusaha Eropa-, menunjukkan bahwa beberapa infrastruktur di Semarang telah dikembangkan sesuai konsep perencanaan kota-kota di Eropa. Beberapa gambaran infrastruktur di atas, memperlihatkan bahwa pembangunan gedung-gedung pemerintah, kantor dagang, dan agen-agen perkebunan dapat dijadikan simbol kemodernan sebuah kota.

Pasar dapat juga dijadikan element primer dan dapat pula menunjukkan dinamika pertumbuhan ekonomi perkotaan, tetapi pasar di Semarang lebih menunjukkan *pribumi style*. Secara fisik ruang pasar di Semarang menjadi sesuatu yang dianggap tidak teratur, tidak bersih, mengganggu, dan tidak sesuai dengan syarat-syarat kesehatan lingkungan perkotaan Semarang yang modern, sehingga tidak memenuhi sebagai sebuah

kota yang sehat. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan, mengganggu transportasi, membuat pedagang-pedagang liar tidak bisa ditertibkan.

Sampai tahun 1910-an meski telah dilakukan berbagai upaya untuk menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang ideal dengan berbagai kelengkapan infrastrukturnya, masih dihadapkan pada kondisi fisik pasar yang tidak sehat dan tidak teratur. Dalam kondisi demikian, menunjukkan bahwa pasar sebagai salah satu ruang infrastruktur kota, menjadi persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang. Penguasa kota (pemerintah kota) yang sebagian besar diwakili oleh orang-orang Eropa, telah melahirkan kesadaran tentang pentingnya kesadaran kesehatan lingkungan, kebersihan, ketertiban, sehingga diperlukan sebuah modernisasi atas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 1994. *The Muslim Businessmen of Jatinom: Religious reform and economic modernization in a Central Javanese town*. Universiteit van Amsterdam.
- Ammarell, Gene. 2002. "Bugis Migration and Modes of Adaptation to Local Situations". *Ethnology*, 41 (1), p. 54.
- Basri, Hasan. 1988. "Pergeseran Orang Banjar ke Surakarta: Kasus Migrasi Inter Etnis di Indonesia." *Prisma*, XVII (3).
- Bastin, John. 1957. *The Native Policies of Sir Stamford Raffles in Java and Sumatra, An Economic Interpretation*. Oxford: The Clarendon Press.
- Basundoro, Purnawan. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Blackburn, Susan. 2011. *Jakarta: Sejarah 400 Tahun*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Brommer, B., et al., (ed.). 1995. *Semarang, Beeld van een Stad*. Voorburg: Asia Maior.
- Budiman, Amen. 1976. "Semarang Riwatmu Dulu: Boom Lama – Boom Baru", *Suara Merdeka*, 2 April.
- Cobban, James L. 1974. "Uncontrolled Urban Settlement: The Kampong Question in Semarang 1905 – 1940." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 130 (4), hlm. 403-427

- Day, Clive, Vertaling van H.D.H. Bosboom. 1905. *Nederlandsch Beheer over Java Gedurende Drie Eeuwen*. Gravenhage: W.P. Van Stockum & Zoon.
- De Locomotief*, "De Pasars", 24 Joeli 1907, Jg:12, №: 143.
- De Locomotief*, "Uit de Indische Bladen, Indische Passers", 27 Juli 1907. *Selompret Melajoe*, "Gemeenteraad di Semarang" Selasa, 30 Djanoeari 1906, №.13.
- Dick, H.W. 2002. "Industrialisasi Abad ke-19, Sebuah Kesempatan yang Hilang?", dalam J. Thomas Lindblad (ed.) *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM – Pustaka Pelajar.
- Edw. Jacobson, Edw., Van Hasselt, J.H., and Toth, Andrew. 1975. "The Manufacture of Gongs in Semarang", *Indonesia*, 19, April, hlm. 129.
- Frederick, William H. 1983. "Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia", *Journal Southeast Asia Studies*. 4 (2), September.
- Furnivall, J.S. 2009. *Hindia Belanda, Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gillion, K.L., .Review: Satish C. Misra, 1966. "Muslim Communities in Gujarat. Preliminary Studies in their History and Social Organization." *Journal of Southeast Asian History*, 7 (2), hlm. 124-125.
- Hugo, Graeme J. 1982. "Circular Migration in Indonesia." *Population and Development Review*, 8 (1), hlm. 61.
- Huub de Jonge. 2007. "Sebuah Minoritas Terbelah, Orang Arab Batavia", dalam Kees Grijns dan Peter J.M.Nas (peny.). *Jakarta Batavia: Esai Sosio-Kultural*. Jakarta: Banana-KITLV.
- Joe, Liem Thian. 1933. *Riwayat Semarang 1416 – 1931*. Semarang – Batavia: Boekhandel Ho Kim Yo.
- Justus M. van der Kroef, 1953. "The Arabs in Indonesia." *Middle East Journal*, 7(3), Summer, hlm. 302-305.
- Ketjen, W.J. 1915. "Decentralisatie Verslag 1912-1913", dalam *Kolonial Tijdschrift*, Uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur in Nederlandsch-Indië, Deerde Jaargang-eerste Halfjaar, 's-Gravenhage.
- Kuncoro, Mudrajad. 1995. "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan." *Prisma*, 14 (4).
- Lea E. Williams. 1956. "Indonesia's Chinese Educate Raffles", *Indonesie*, 9^c Jg. Oct.
- Leirissa, R.Z. 1985. *Terwujudnya Suatu Gagasan, Sejarah Masyarakat Indonesia 1900–1950*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Malo, Manasse dan Nas, P.J.M. 2007. "Otonomi daerah, Manajemen perkotaan di Indonesia 1991", dalam P.J.M. Nas (ed.). *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Muhammad, Djawahir. 1995. *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*. Semarang: Pemda Kodia Semarang – DKJT – Aktor Studio.
- Nagata, Judith A. 1990. "Apa Itu Orang Melayu? Seleksi Identitas Etnik Berdasarkan Situasi dalam Suatu Masyarakat Majemuk", dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique, dan Yasmin Hussain (ed.). *Islam di Asia Tenggara: Perkembangan Kontemporer*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES
- Nas, P.J.M., dan Pratiwo. 2007. "Jawa dan De Groote Postweg, La Grande Route, The Great Mail Road, Jalan Raya Pos", dalam P.J.M. Nas (ed.). *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nas, P.J.M., dan Boender, Welmoet. 2007. "Kota Indonesia dalam teori perkotaan 2002", dalam P.J.M. Nas (ed.). *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nas, Peter J.M. dan Theuns, Kristen. 2007. "Semarang, Apakah H.F. Tillema Seorang Sutradara Perubahan Kota?" dalam P.J.M. Nas (ed.). *Kota-Kota Indonesia, Bunga Rampai*. Terjemahan Nin Bakdi Soemanto dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- O'Brien, Aileen. 1937. "The Moors in Spain." *The Irish Monthly*, 65 (769), hlm. 469-474
- Ongkhokham. 1983. "Merosotnya Peranan Pribumi dalam Perdagangan Komoditi." *Prisma*, 12 (8).
- Potter, Lesley. 2000. "Orang Banjar di dan di Luar Hulu, Kalimantan Selatan: Studi tentang Kemandirian Budaya, Peluang Ekonomi dan Mobilitas." dalam J. Thomas Lindblad (ed.) *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia, Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Purwanto, Bambang. 2004. "Antara Sentralisasi dan Desentralisasi: Ekonomi dan Otonomi Daerah dalam Realitas Sejarah." *Lembaran Sejarah*, 7(7).

- Purwanto, Bambang. "Ekonomi Karet Rakyat Indonesia, Tahun 1890-an Sampai 1940", dalam J. Thomas Lindblad (ed.). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM – Pustaka Pelajar.
- Purwanto, Bambang. 2000. "Merajut Jaringan di Tengah Perubahan: Komunitas Ekonomi Muslim di Indonesia Pada Masa Kolonial." *Lembaran Sejarah*, 2(2).
- Purwanto, Bambang. 2009. "Sejarah dan Jati diri Dalam Ingatan Bersama Asia Tenggara", dalam Adrian Vickers, *Peradaban Pesisir, Menuju Sejarah Budaya Asia Tenggara*. Denpasar: Pustaka Larasan – Udayana University Press.
- Raben, Remco. 2007. "Seputar Batavia: Etnisitas dan Otoritas di Ommelanden, 1650 – 1800", dalam Kees Grijns dan Peter J.M. Nas (ed.) *Jakarta Batavia, Esai Sosio – Kultural*. Jakarta: KITLV.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië*. Batavia: Landsdrukkerij, 1902.
- Regeringsalmanak voor Nederlandch-Indië 1885*, Tweede Gedeelte: Kalender en Personalie. Batavia- Landsdrukkerij, 1884.
- Reid, Anthony. 2001. "Understanding Melayu .Malay as a Source of Diverse Modern Identities", *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (3).
- Resink, G. 2012. *Bukan 350 Tahun Dijajah*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Rudolf Mrázek. 2006. *Engineers of Happy Land, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di sebuah Koloni*. Diterjemahkan Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rush, James R. 1983. "Social Control and Influence in Nineteenth Century Indonesia: Opium Farms and The Chinese of Java." *Indonesia*, 5^e Jg. April 1983.
- Selompret Melajoe*, "Vergadering Membitjarkan Pasar", Sabtoe, 22 Joeni 1907
- Selompret Melajoe*, "Peperiksa'an Pasar", Sabtoe, 22 Djoeni 1907.
- Selompret Melajoe*, "Begal", Sabtoe, 10 Okt 1906, №.135.
- Selompret Melajoe*, "Gegernja orang perampoean", Selasa, 26 November 1907, №.141.
- Selompret Melajoe*, "Membawa barang dengan grobag", Selasa, 26 November 1907, №.141.
- Selompret Melajoe*, "Menghimat", Selasa, 29 November 1907, №.129.
- Selompret Melajoe*, "Pasar Djohar dalam Gemeenteraad", Selasa, 29 November 1907, №.129.
- Selompret Melajoe*, "Tjerdik", Selasa, 26 November 1907, №.141.
- Selompret Melajoe*, "Gemeenteraad", Kamis, 12 Desember 1907, №.148.
- Selompret Melajoe*, "Gemeenteraad", Selasa, 3 Desember 1907, №.144.
- Selompret Melajoe*, "Kemadjoean dan Kemoendoeran Semarang", Selasa, 21 Djanoeari 1908, №.9.
- Selompret Melajoe*, "Kadet", Kamis, 5 Maart 1908, №.28.
- Selompret Melajoe*, "Sarang Kadet", Saptoe, 7 Maart 1908, №.29.
- Selompret Melajoe*, "Orang Kasihan", Saptoe, 8 Agust 1908, №. 95.
- Selompret Malajoe*, "Ketangkap", Kemis, 8 Sept 1910, №.107.
- Seputar Semarang*, "Kampung Melayu Kawasan Perdagangan di Abad 18" 7-13 Desember 2004, №.67, hlm. 9.
- Shokeh, Mukhamad. 2014. *Gerakan Keagamaan dan Perubahan Sosial, Dakwah Islam dan Misi Katolik di Semarang 1890-1940*. Pati: Kireinara.
- Staatsblad van Nederlandsch Indië 1903*, No.329 .Batavia: Landsdrukkerij.
- Suryo, Djoko (Ed.). 2009. *Transformasi Masyarakat Indonesia Dalam Historiografi Indonesia Modern*. Yogyakarta: Penerbit STPN Press.
- Suryo, Djoko. 1989. *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830–1900*. Yogyakarta: PAU Studi Sosial, UGM.
- Suud, Abu. 1995. "Nama Pekojan dan Asal Usulnya", dalam Djawahir Muhammad (ed.), *Semarang Sepanjang Jalan Kenangan*. Semarang: Pemda Kodia Semarang – DKJT – Aktor Studio.
- Tio, Jongki. tt. *Kota Semarang Dalam Kenangan*. Semarang.
- Van Deventer, C. TH.1904. *Overzicht van den Economischen Toestand Inlandsche Bevolking van Java en Madoera*. 's-Gravenhae: Martinus Nijhoff.
- Van Hasselt, J. 1929. "Enkele Opmerkingen Betreffende het Passarwezen", dalam *Locale Belangen*, XVI, 1929.
- Wertheim, W.F. 1956. *Indonesian Society In Transition: A Study of Social Change*. Van Hoeve, Bandung: Mij Vorkink, Sumur Bandung.
- White, Benjamine. 1991. "Economic Diversification and Agrarian Change in Rural Java, 1900 – 1990" dalam Paul Alexander, Peter Boomgaard, Ben. White (ed.). *In Shadow of Agriculture: Non-Farm Activities in the Javanese Economy, Past and Present*. Amsterdam: Royal Tropical Institute.

Wijanarka. 2007. *Semarang Tempo Dulu: Teori Desain Kawasan Bersejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Zuhri, Saifuddin. 1980. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: P.T. Alma'Arif.